



Sofyan Djalil, 'Kunci Inggris' di Dua Pre (1)

Kami Tahu Siapa Pemilik Tanah di Calon Ibu Kota

RENCANA pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan banyak kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)-Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tak pelak Menteri ATR-Kepala BPN, Sofyan Djalil ikut sibuk terlibat dalam urusan penyediaan lahan calon ibukota seluas 256 ribu hektare. "Pertama kami identifikasi apa dan bagaimana tanah di kawasan itu. Kami bikin IP4T (iden-

■ Bersambung ke hal. 7



WAWANCARA EKSKLUSIF
Tribun Pontianak



Kami Tahu Siapa Pemilik Tanah...

Sambungan Hal.1

tifikasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah). Jadi kami tahu siapa dan apa. Kalau ada hak milik, hak milik siapa, kalau ada HGU (hak guna usaha), HGU punya siapa," ujar Sofyan Djalil dalam wawancara eksklusif dengan tim *Tribunnews Network* di ruang kerjanya, kantor Kementerian ATR-BPN, Jalan Sisingamangaraja No 2, Jakarta, Kamis (27/2). Berikut petikan wawancara dengan Sofyan Djalil.

Presiden Jokowi pernah menyebut ada sekira 80 juta sertifikat yang harus dituntaskan. Menurut Anda apakah target itu reasonable (masuk akal)?

Tujuan pemerintah adalah bagaimana bisa mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Kalau bisa kita terbitkan sertifikatnya. Menurut perkiraan, paling sedikit ada 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang perlu didaftarkan, mulai ukuran kecil sampai ada yang 2.000 hektare.

Pada 2015 tanah yang bersertifikat baru 46 juta. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, sampai akhir 2019 bertambah sekira 27 juta yang sudah didaftarkan.

Jadi kalau itu 46 juta ditambah 27 juta berarti sudah 73 juta yang sudah terdaftar. Memang belum tentu tanah yang sudah terdaftar itu bersertifikat.

Jadi kalau targetnya 126 juta bidang tanah terdaftar,

berarti masih tersisa sekitar 53 juta bidang tanah. Target kami, pada 2025 semua bidang tanah itu sudah terdaftar.

Apakah menurut Anda target itu reasonable?

Tentu *reasonable* walaupun memang ini banyak daerah yang jauh-jauh itu sebenarnya mereka tidak terlalu butuh sertifikat. Yang penting bidang tanah itu didaftarkan meskipun tidak harus semua diterbitkan sertifikatnya.

Rencana pemindahan dari Jakarta ke Kaltim apakah menambah pekerjaan buat Anda?

Semua tanah yang dicadangkan untuk kawasan ibu kota pada tahap ini adalah 256 ribu hektare. Untuk *core* (inti) ibu kota tahap pertama pembangunan sekira 6 ribu hektare.

Pertama kami identifikasi apa dan bagaimana tanah di kawasan itu. Kami bikin IP4T (identifikasi pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah). Kami sudah tahu siapa dan apa. Kalau ada hak milik, hak milik siapa, kalau di atasnya ada HGU (hak guna usaha) itu HGU siapa. Dari luas lahan yang diperlukan, alhamdulillah lebih dari 90 persen tanah negara yang bebas.

Bagaimana kondisi tanah negara yang mencapai jumlah 90 persen dari 256 ribu hektare?

Kalau tanah negara ada dua, yaitu lahan berupa hutan dan ada tanah be-

kas konsesi pengusaha Sukanto Tanoto yang dilepaskan. Itu adalah hutan tanaman industri, yang nanti setelah dipanen, akan ditanami lagi, ditanamkan kembali.

Apakah konsesi Sukanto Tanoto masih berlaku?

Masih, tapi sudah dikurangi, sudah dikeluarkan konsesinya, itu langsung dikuasai oleh negara. Selain itu ada Bukit Soeharto, bagian dari ibu kota nanti. Juga hutan di luar Taman Nasional Bukit Soeharto.

Ada tanah-tanah masyarakat walaupun tidak banyak, sekira 10 persen itu. Tanah-tanah itu ada yang sudah bersertifikat. Ada yang secara *de facto* dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat tapi tidak bersertifikat.

Tanah-tanah di kawasan calon ibu kota negara dalam kondisi status quo, artinya tidak boleh dialihkan tanpa izin. Setelah badan otorita terbentuk harus izin lembaga itu. Kalau mau menjual harus ditawarkan dulu kepada badan otorita.

Apakah BPN ikut memantau adanya kemungkinan praktik spekulasi?

Kami sudah tahu siapa saja pemilik lahan di sana. Kami akan batasi harga di sana, dengan mekanisme misalnya kontrol pajak. Kalau ada spekulasi, gigit jari saja nanti. Nilai tambah yang tercipta itu akan dipajaki, supaya jangan ada orang berspekulasi tanah di sana. (reza deni)